



Implementasi aplikasi pelita kalbar dalam pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

Lalu Ahmad Murdhani¹, Restu Ragyl Hariyanto², Hendi Margio³, Hisyam Aslamsyah⁴

^{1,2,3,4} Institut Pemerintahan dalam Negeri

¹laluahmad@ipdn.ac.id, ²30.0900@praja.ipdn.ac.id, ³30.0886@praja.ipdn.ac.id, ⁴hisyamaslamsyah@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

5 Januari 2022

Disetujui :

9 Januari 2022

Dipublikasikan :

13 Januari 2022

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang terjadi dalam implementasi aplikasi PELITA KALBAR dalam pelayanan kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang dilakukan melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian hanya satu orang yaitu Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi PELITA KALBAR dalam pelayanan kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaannya sudah cukup optimal. Tetapi terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan yaitu seperti terbatasnya sumber daya manusia untuk mengoperasikan aplikasi PELITA KALBAR, kurangnya hubungan mitra antar dinas yang terkait, serta masih ada masyarakat yang belum sadar akan adanya aplikasi PELITA KALBAR. Hal ini dapat mengganggu dan memperlambat kinerja pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi.

Kata kunci: Implementasi, Pelayanan, PELITA KALBAR

ABSTRACT

This journal aims to find out what are the obstacles or resistances that occur in the development the implementation of the PELITA KALBAR application in service to the people in the province of West Kalimantan. The research method was used only one informant, namely the Head of Section for Road Traffic Facilities and Infrastructure. The results showed that the development implementation of the PELITA KALBAR application in service to the people in the province of West Kalimantan already optimal. But there are several obstacles or obstacles in implementation, such as the limited human resources to operate the PELITA KALBAR application, lack of partner relations between the relevant agencies, and there are still people who are not aware of the PELITA KALBAR application. This can disrupt and slow down the government's performance to solve problems that occur.

Keywords : Implementation, Service, PELITA KALBAR



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini internet dan aplikasi perangkat lunak computer telah berkembang pesat, dan juga dengan browser internet dan aplikasi web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Internet (Interconnected Network) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer sehingga menghasilkan sumber informasi dan dapat mengakses informasi tersebut dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan mudah.

Menurut Ibis, Perangkat lunak aplikasi adalah program pengguna akhir yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di berbagai bidang pekerjaan, seperti membuat dokumen, spreadsheet, database, publikasi, melakukan riset online, mengirim email, membuat desain grafis, menjalankan bisnis, bermain game, dsb. Aplikasi desktop atau komputer adalah program komputer yang berjalan secara lokal di perangkat komputer seperti PC atau laptop. Aplikasi komputer dibatasi oleh persyaratan perangkat keras dari perangkat yang menjalankannya. Aplikasi memainkan peran penting dalam

komputer karena merupakan program pengguna akhir yang memungkinkan user melakukan banyak hal dalam suatu sistem. (XO, 2022)

Perangkat lunak aplikasi tidak dapat berjalan sendiri karena memerlukan perangkat lunak sistem untuk menjalankan program. Perangkat lunak sistem seperti Windows, Mac, Linux, dan banyak lagi membantu perangkat lunak aplikasi untuk dijalankan di Komputer. Dengan kata lain, komputer membutuhkan sistem operasi dan sistem operasi membutuhkan perangkat lunak aplikasi.

Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat (PELITA KALBAR) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan oleh Masyarakat dalam melakukan pengaduan seputar jalan raya, lalu Lintas dan sarana prasarana yang ada di jalan raya (PELITA KALBAR, n.d.).

Aplikasi PELITA KALBAR terdiri dari dua platform yaitu berbasis web dan berbasis mobile. pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk saat ini masih menggunakan operating sistem Android. Untuk menjalankan Aplikasi pelormas terlebih dahulu dilakukan konfigurasi web servis dan database. untuk aplikasi berbasis mobile terlebih dahulu akan dapat di unduh di Google Play Store dengan nama "PELITA KALBAR" ini dapat berjalan pada smartphome Andorid (Transportasi et al., n.d.). Laporan yang disampaikan oleh Masyarakat tersebut nantinya akan diterima oleh FLLAJ dan kemudian akan di teruskan kepada pihak yang relevan dengan laporan yang masuk. FLLAJ sebagai center aduan harus memahami secara seksama mekanisme kerja dalam Aplikasi PELITA KALBAR agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. dalam rangka itulah, TIM IT PIC PHJD melakukan Training kepada FLLAJ agar mandiri dalam menjalankan aplikasi tersebut lalu dari FLLAJ pun membagi dan menentukan perwakilan dari setiap Dinas Perhubungan Bagian Lalu Lintas Jalan dari Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengoperasikan aplikasi ini.

Aplikasi PELITA KALBAR sudah menerapkan prinsip pengembangan teknologi Informasi terkini untuk memudahkan proses pengembangan yang bersifat flexibel dan user friendly. Stabilitas dan keamanan system menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan sehingga pengguna aplikasi merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi pelormas (Transportasi et al., n.d.).

Cara menjalankan aplikasi PELITA KALBAR yaitu unduh di Google Play Store, lalu daftar akun untuk bisa login ke aplikasi PELITA KALBAR, selanjutnya langsung bisa mengajukan atau melaporkan kondisi masalah setiap di daerah masyarakat tersebut dengan mengisi biodata dan mencantumkan bukti atau foto supaya operator bisa tahu masalah yang terjadi.

Dalam penerapannya, pengoperasian dari aplikasi ini sudah berjalan dengan lancar karena dari fasilitas atau sarana dan prasarana untuk menunjang aplikasi ini sudah terpenuhi dan dari kualitas Sumber Daya Manusia yang mengatur aplikasi ini sudah terlatih karena telah melaksanakan Training yang diberikan oleh TIM IT PIC PHJD. Kemudian untuk saat ini belum ada keluhan dari masyarakat tentang sistem aplikasi tersebut dan masyarakat sangat terbantu dengan aplikasi PELITA KALBAR, karena masyarakat tidak perlu capek-capek untuk datang ke kantor Dinas Perhubungan yang di Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Dengan jarak jauh, masyarakat sudah bisa melaporkan mengenai kondisi jalan raya, lalu Lintas dan sarana prasarana yang bermasalah di jalan raya.

Hambatan yang dialami selama tim IT FLLAJ melaksanakan tugas yaitu, jumlah Sumber Daya Manusia yang belum terpenuhi. Karena dapat dilihat sekarang salah satu admin sedang mengalami masa penyembuhan disebabkan kecelakaan yang dimana berdampak kepada admin lain sehingga memiliki tambahan pekerjaan. Kemudian dari admin sepenuhnya dipegang oleh Dinas Perhubungan sendiri.

Selain jumlah Sumber Daya Manusia, faktor eksternal dari masyarakat seperti pemahaman dari beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal teknologi informasi dan banyak masyarakat dari daerah yang kesusahan sinyal belum bisa mengakses dan melaporkan kondisi di daerahnya. Dari hambatan tersebut, dapat kita ketahui sangat berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintah yang nantinya akan terjadi ketidaktahuan sehingga proses tindaklanjuti untuk memperbaiki yang seharusnya cepat akan menjadi terhambat dan akhirnya telat.

Berdasarkan hambatan tersebut, maka diperlukan penanganan dari pemerintah yang lebih optimal. Yaitu dengan cara menambah Sumber Daya Manusia di bidang Lalu Lintas Jalan dan memberikan pelatihan khusus untuk memahami teknologi informasi termasuk aplikasi PELITA KALBAR. Selanjutnya, pemerintah dapat membangun infrastruktur atau sarana prasarana di daerah yang masih belum ada sinyal dan memberikan pemahaman teknologi secara langsung agar masyarakat memahami dasar dari teknologi informasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan cepat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi aplikasi PELITA KALBAR dalam pelayanan kepada masyarakat di provinsi Kalimantan Barat secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif akan mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan implementasi tersebut (Tujuan Kajian Pustaka, n.d.).

Penelitian tentang implementasi aplikasi PELITA KALBAR ini dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak dibukanya Praktek Lapangan 3 untuk satuan Nindya Praja, yaitu tanggal 11 Mei s.d. 3 Juni 2021. Adapun objek penelitian ini adalah implementasi aplikasi PELITA KALBAR dalam pelayanan kepada masyarakat di provinsi Kalimantan Barat. Adapun subjek penelitian yang merupakan dari mana data diperoleh. Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini adalah Antonius Haryo Pungkas Anom, ST sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Subjek dinilai telah memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh.

Data dikumpulkan melalui kajian pustaka. Menurut Cooper dalam Creswell (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Menurut Ratna, dasar pertimbangan alasan disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian (Prastowo, 2015) didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi yang dapat dianalisis secara berbeda-beda lebih dari satu kali, meskipun oleh orang yang berbeda..

Peneliti harus mengetahui secara pasti terlebih dahulu tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu diperoleh sebelum melakukan telaah bahan pustaka. Adapun beberapa sumber yang digunakan seperti; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian, internet, serta sumber lainnya yang relevan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah mengambil dari sumber data. Sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dokumen atau catatan akan menjadi sumber data jika penulis menggunakan dokumentasi, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian (Suharsimi Arikunto 2006: 61). Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. sumber data primer diambil melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud ialah website.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menguraikan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Burhan Bungin menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam Teknik analisis (Bungin, 2005), yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), display data, serta verifikasi dan penegasan kesimpulan (conclusion drawing and verification).

Analisis data dilakukan antara display dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya data yang telah dianalisis akan dijelaskan, dan dimaknai dalam bentuk kata-kata yang mendeskripsikan fakta di lapangan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan implementasi aplikasi PELITA KALBAR dalam pelayanan kepada masyarakat di provinsi Kalimantan Barat yang meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Implementasi Aplikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, seharusnya pelaksanaan ini mampu membimbing masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur kehidupan bermasyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada pelaksanaannya tidak semuanya berjalan dengan sebagaimana yang tertera.

Berdasarkan penerapan E-Government menurut Budi Rainto dan Tri Lestari, menunjukkan bahwa penerapan E-Government memiliki beberapa aspek penting yaitu Hardware dan Software, Human Resource (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana, sebagai berikut:

1. Hardware dan Software

Hardware atau yang disebut komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer (computer) diambil dari bahasa Latin *computare* yang berarti menghitung (to compute atau to reckon). Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi .

Sedangkan, Perangkat lunak atau software adalah perintah dari program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program (Ansori, 2019).

Pada wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan yang telah kami lakukan, mengatakan bahwa:

kalau hardware, dilihat dari fasilitas komputer semuanya sudah terpenuhi dan sudah memadai, kemudian untuk softwarena kalau dari website nya kita menggunakan server website dari kalbarprov.go.id yang dimana website ini dikelola oleh kominfo. website kalbarprov.go.id tidak hanya menyediakan situs FLLAJ tetapi juga dengan situs lainnya seperti SIRUP, SIKEDIP, SIPRAJA, dll. Selanjutnya situs FLLAJ saling berkaitan dan terhubung dengan aplikasi PELITA KALBAR yang dimana masyarakat bisa mengakses dan melaporkan pengaduan dari salah satu software tersebut dan dari pengaduan masyarakat akan diproses oleh kesuluruhan admin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa wadah pelaporan bagi masyarakat sudah dibuat, kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kegiatan Admin

Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
Menyediakan wadah untuk masyarakat melakukan pengaduan atau pelaporan	Admin akan menindaklanjuti dari pengaduan masyarakat Admin juga menerima pengaduan dari masyarakat jika aplikasi atau website bermasalah

Sumber : Wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa beberapa kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam suatu kegiatan pengoperasian aplikasi PELITA KALBAR.

2. Human Resource (SDM)

Sumber daya manusia adalah beberapa orang atau manusia yang berada di organisasi yang memberikan melakukan berbagai jenis pekerjaan dan sumbangan pemikiran dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang dimaksud sumbangan yaitu pemikiran yang berupa pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam instansi atau perusahaan tersebut. Dengan demikian sumber daya manusia yang meliputi bukan hanya sebatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi mencakup semua tenaga kerja yang digunakan instansi atau perusahaan tersebut yang berguna mewujudkan tujuan-tujuannya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dari semua masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari dua yaitu makro dan mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah rangkaian peningkatan kualitas, kemampuan, pengetahuan manusia guna mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan,. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan agar meningkatkan tenaga kerja yang bertujuan mencapai suatu hasil yang optimal . Antonius Haryo Pungkas Anom, ST mengatakan bahwa:

Sementara ini, aplikasi PELITA KALBAR masih dalam proses pengembangan yang mana pengembang ini berasal dari pusat dan pengembang masih membantu mengoperasikan aplikasi agar berjalan dengan sempurna. Untuk saat ini super admin membutuhkan SDM yUntuk dari Dinas Perhubungan sendiri terdiri dari super admin, admin, dan LO (Liaison Officer). LO yang dimaksud adalah beberapa perwakilan dari setiap kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengoperasikan aplikasi PELITA KALBAR, sehingga hal tersebut dapat mempercepat proses pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diklasifikasikan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Manajemen sumber daya manusia

Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
Menentukan dan Memilih pegawai yang dirasa pantas mengoperasikan aplikasi PELITA KALBAR	Memberikan edukasi dan pengetahuan kepada pegawai tentang system aplikasi PELITA KALBAR Memberikan pelatihan khusus oleh TIM IT PIC PHJD agar pegawai tersebut dapat mengoperasikan aplikasi PELITA KALBAR

Sumber : Wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Data dan Informasi

Pada dasarnya adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau dugaan. Menurut Pendit (1992), data merupakan hasil pengamatan observasi/survey nyata terhadap peristiwa atau kejadian nyata yang merupakan representasi simbol yang mewakilkan sasaran dalam kehidupan nyata yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Ralston dan Reilly (Chamidi, 2004: 314), data diartikan fakta atau apa yang terjadi di lapangan sebagai hasil dari pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa alam. Sebagai hasil dari pengamatan terhadap kenyataan yang ada dilapangan data dapat berupa tulisan atau gambar yang diciri ciri kan dengan nilai nilai tertentu, Contohnya daftar jumlah pelanggaran lalu lintas di daerah x.

Menurut UU No 14 Tahun 2008 informasi merupakan Keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dimaknai yang ditampilkan melalui macam bentuk dengan menyesuaikan perkembangan zaman teknologi secara berkelanjutan.

Adapun jika dikaitkan dengan sistem informasi , informasi merupakan kumpulan data yang tersusun yang dapat dikomunikasikan melalui bahasan lisan, tulisan, gambar, video dan lain sebagainya. Hal tersebut memiliki dua makna yaitu, sebagai benda nyata dan sebagai sesuatu yang abstrak. Pernyataan tersebut berdasarkan pendapat Teskey (Pendit, 1992) . Menurutnya, informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang terstruktur yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Kemudian menurut Gordon B. Davis (1998: 28) juga memberikan pendapat bahwa informasi dalam sistem informasi diartikan sebagai data yang telah diproses menjadi bentuk yang berarti bagi penerimannya dan bermanfaat dalam menentukan sesuatu yang akan datang.

Individu sebagai penerima informasi tentu ingin mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Keakuratan informasi dapat dipastikan apabila informasi tersebut sudah diverifikasi, yaitu kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata, lengkap, cepat, dan tepat serta dapat

dipertanggungjawabkan sehingga individu atau pihak yang menerimanya dapat menentukan langkah yang harus diambil terhadap tindakan pengguna tersebut kedepannya (Ati et al., n.d.). Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 mengatakan bahwa:

Dalam penerapannya pengajuan atau pelaporan ke aplikasi PELITA KALBAR dari setiap daerah sangat lancar, hal ini dikarenakan peran penting dari LO dari setiap kota dan kabupaten. Kemudian dari pihak operator sendiri memberitahukan tata cara proses pekerjaan dari setiap pengajuan atau pelaporan tersebut sehingga masyarakat dapat memperhatikan dan memahami dari setiap proses pekerjaan pemerintah.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita klasifikasikan data dan informasi mengenai kinerja pemerintah dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data dan informasi

Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
Transparan dalam menampilkan data dan informasi kepada masyarakat	Mempublikasikan data dan informasi pengajuan atau pelaporan dari masyarakat di setiap daerah
	Menyertakan tugas dan kinerja dari pemerintah sehingga masyarakat dapat melihat hasilnya.

Sumber : Wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022

Dari tabel 3, operator memberikan data dan informasi secara terbuka agar masyarakat bisa tahu proses dari setiap pengaduan dan pelaporan tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Menurut Robbins & Coulter Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal suatu kelompok yang dengan kerangka itu dimana seluruh tugas dan fungsi dari anggota nya dibagi bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan berdasarkan hierarki yang dimiliki oleh setiap anggota kelompoknya. Struktur organisasi yang baik dapat menciptakan sistem tata kerja yang baik pula. Dalam suatu organisasi biasanya terdapat seorang pemimpin yang bertindak untuk mengatur anggota nya dalam membentuk kesatuan tujuan sesuai dengan visi misi organisasi tersebut. Struktur organisasi harus selalu di evaluasi untuk memastikan konsistensinya dalam pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sekarang.

Struktur organisasi dapat juga diartikan sebagai alat untuk membantu proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing kearah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai visi misi organisasi (Nurhayati & Darwansyah, n.d.). Berikut wawancara dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan sebagai berikut:

Saya jelaskan tadi ada beberapa bagian, yang pertama pengembang yang berasal dari pusat, super admin dan admin dari Dinas Perhubungan Provinsi, serta LO yang berasal dari Dinas Perhubungan kota dan kabupaten. Masing-masing memiliki tugas dan fungsinya, contohnya super admin yang memfilter dan menindaklanjuti dari setiap laporan dan pengajuan yang nantinya masalah tersebut akan di sampaikan kepada instansi yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diklasifikasikan manajemen struktur organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Struktur organisasi

Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
Menentukan dan Memilih pegawai yang menguasai bidang tersebut yaitu: super admin, admin, dan LO	Melaksanakan tugas dan fungsinya dari setiap bagiannya masing-masing
	Tidak melebihi tugas dan fungsinya agar tidak ada timbul masalah

Sumber : Wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022

Berdasarkan tabel 4, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah menentukan dan memilih pegawai yang menguasai di bidangnya dan memberikan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Komunikasi

Menurut Wibowo komunikasi adalah kegiatan menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran seseorang, rancangan yang seseorang punya dan kemauan yang ingin seseorang beritahukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau sebagai kapasitas memberi pengaruh kepada yang lain dalam mengapai sesuatu yang seseorang mau capai.

Komunikasi merupakan sebuah distribusi penting yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan selaku makhluk sosial. Pada dasarnya komunikasi bisa di laksanakan baik lisan maupun verbal hingga mampu di mengerti sama kedua pihak. Komunikasi dapat terjadi bila ada kedua orang atau lebih dalam melakukan interaksi yang dimana biasanya menciptakan sebuah persoalan yang terdapat pesan yang ingin di agihkan. Komunikasi mempunyai maksud tujuan agar menciptakan kesepemikiran dari kedua belah pihak (BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Komunikasi 2.1.1 Pengertian Komunikasi, n.d.). Dari wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022, mengatakan bahwa: "Sampai saat ini kita melakukan komunikasi dalam arti menyebarluaskan aplikasi PELITA KALBAR melalui website dan media sosial, kami saat ini merencanakan ingin mengajukan endorse kepada artis-artis yang berada di media sosial sehingga nantinya ini sangat berpengaruh kepada peningkatan jumlah pengguna aplikasi PELITA KALBAR. Yang mana dalam iklan tersebut kita memberitahukan fungsi dari aplikasi ini dan juga memberikan tata cara menginstall aplikasi ini. Kemudian sosialisasi langsung turun ke masyarakat belum kami lakukan dikarenakan tahun kemarin masih pandemic COVID-19 dan juga masih banyak masyarakat yang belum tahu akan adanya aplikasi PELITA KALBAR dikarenakan tempat tinggal mereka yang kekurangan sinyal internet". Berkaitan dengan komunikasi ini kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Komunikasi kepada masyarakat

Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
Menciptakan dan menyebarluaskan iklan melalui media sosial	Mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya aplikasi PELITA KALBAR
	Memberikan tata cara menginstall aplikasi PELITA KALBAR

Sumber : Wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022

Dari tabel 5, dapat diketahui kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dan guna mempercepat kinerja pemerintah.

6. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan sikap atau aksi yang di perlihatkan dari para pelaksana. sikap pelaksana adalah faktor penting saat pendekatan menjatuhkan studi implementasi peraturan umum, karena sikap pelaksana adalah kewajiban buat strategi. pelaksanaan peraturan bisa berjalan dengan baik apabila para wewenang tidak hanya mengetahui apa yang menjadi suatu keharusan yang di lakukannya, namun juga harus mempunyai kapasitas dalam melakukannya. dan jika kemauan dari mereka supaya melaksanakan peraturan tersebut.

Pada dasarnya para pelakumenggunakan otoriter dalam mengupayakan suatu peraturan, bisa jadi independensi berusaha akan pencipta peraturan juga karena kompleksitas dari peraturan tersebut. biarpun para pelaksana memakai hak nya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada peraturan peraturan tersebut namun pada akhirnya perbuatan merekalah bisa berdampak akan tujuan dari perindividu (Susila Hidayati, n.d.). Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 mengatakan bahwa:

Untuk dari sikap pelaksana, semuanya sangat terbantu dengan adanya aplikasi PELITA KALBAR, dikarenakan dengan operator yang menyebarluaskan aplikasi ini dan proses yang cepat dari pengajuan dan pelaporan masyarakat sehingga operator dapat memprosesnya dengan cepat juga disitu operator merasa sangat termotivasi. Lalu dari sikap masyarakat semua merasa sangat terbantu juga, mereka tidak perlu datang ke kantor jauh-jauh melainkan mereka hanya mengakses website dan aplikasi PELITA KALBAR yang telah disediakan.

Berkaitan dengan sikap pelaksana ini kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Sikap pelaksana terhadap masyarakat

Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
Menyerbarluaskan dan menerima laporan dari masyarakat	Menerima laporan dari masyarakat dengan baik
	Menciptakan sikap pelaksana yang termotivasi dan sikap masyarakat yang merasas sangat membantu

Sumber : Wawancara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022

Dari tabel 6, pelaksana menyerbarluaskan dan menerima laporan dari masyarakat sehingga menciptakan sikap yang baik kantar keduanya.

Faktor penghambat merupakan faktor yang memperlambat suatu proses kegiatan implementasi aplikasi PELITA KALBAR kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Setelah penulis melakukan kajian karya ilmiah ini ditemukanlah faktor penghambat sebagai berikut :

1. Dalam hal jumlah atau kuantitas dari sumber daya manusia yang ada, disini kami mendapatkan bahwa jumlah untuk pengurus atau super admin dari aplikasi PELITA KALBAR masih terbatas, dapat diketahui super admin ada yang sedang mengalami sakit akibat kecelakaan. Sehingga super admin lainnya memback-up dan merasa mengemban tugas yang berat akibatnya banyak pekerjaan yang timbul. Hal ini dapat mengganggu dan memperlambat kinerja dari super admin tersebut.
2. Selanjutnya, kurangnya hubungan antara dinas-dinas yang mengurus kewenangan lalu lintas, infrastruktur, jalan raya, dll. Seperti BPTD, Dinas Pekerjaan Umum, POLRI setempat. Hal ini dapat kita ketahui bahwa operator yang mengurus aplikasi PELITA KALBAR masih dikelola penuh oleh Dinas Perhubungan. Di satu sisi perlu yang namanya bantuan dari dinas-dinas tersebut sehingga nantinya tidak perlu memberitahukan lagi ke dinas tersebut melainkan mereka langsung tahu sendiri jika ada permasalahan di daerahnya. Di sisi lain, dari pusat sementara masih memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan, belum kepada dinas lainnya.
3. Hambatan selanjutnya, yaitu masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya aplikasi PELITA KALBAR dikarenakan tempat tinggal mereka yang masih sangat kekurangan sinyal internet.

Dapat diketahui bahwa daerah yang dimaksud pastinya banyak infrastruktur-infrastruktur yang belum memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi aplikasi PELITA KALBAR di Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan sudah baik, dibuktikan dengan seringnya laporan dan pengajuan dari masyarakat tentang kondisi jalan raya, lalu Lintas dan sarana prasarana yang bermasalah di daerahnya. Selanjutnya, para pelaksana merasa sangat terbantu dengan aplikasi PELITA KALBAR karena dapat membantu dan mempercepat kinerjanya mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dari sisi pelaksana dan sisi masyarakat merasakan banyak dampak positif yang didapatkan dari aplikasi PELITA KALBAR. Saat ini penerapan dari Aplikasi PELITA KALBAR sudah baik namun dalam pelaksanaannya terkadang menemui hambatan seperti jika salah satu SDM yang menjadi admin pengelola laporannya sedang berhalangan masuk kerja, maka proses penerusan laporan antara dari masyarakat ke pemerintah menjadi terhambat, dikarenakan hanya beberapa orang saja yang bias mengelolanya, hambatan selanjutnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan aplikasi PELITA KALBAR adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang berkaitan sehingga menimbulkan sikap saling ketergantungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Z. (2019). Pelatihan Pengenalan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Komputer Untuk Siswa-Siswi Sdn 1 Desa Batu Tegi Kecamatan Air Nanningan. In Z.A. Pagar Alam.
- Ati, S. d. (2020). Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan. Modul, 1.3-1.5.
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 48-67.
- Haspo, L. N. (2020). Penerapan Aplikasi SP4N-Lapor dalam Manajemen Pengaduan Masyarakat di Kota Solok. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 26-33.
- Nugraha, E. S., Padri, A. R., Nurdiawan, O., Faqih, A., & Anwar, S. (2021). Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android Pada Gedung DPRD. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 8(6), 360-366.
- Prastowo, U. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahayu, P. M., & Julianto, I. P. (2021). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada BUMDes Dwi Amertha Sari Desa Jinengdalem. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 11(1), 135-141.
- Sansena, Y. (2021). Implementasi Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Berbasis Website. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia, 15(2), 91-102.
- Sembiring, J. P. (2022). Penerapan Aplikasi Web Untuk Administrasi Di Desa Sidosari Lampung Selatan. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 3(1), 70-78.
- Sena, M. D., Risnawati, R., & Rohminatin, R. (2021). Penerapan Aplikasi Macro Untuk Surat Masuk Dan Surat Keluar Dalam Meningkatkan Pelayanan Desa. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 247-250.
- Setyawan, Z. D., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Program Berbasis Inovasi Pelayanan Kepegawaian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Sapk)(Studi Pada Aplikasi Layanan Pensiun Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). Publika, 159-170.
- Sopiandi, I. (2021, August). Implementasi E-Government Pemerintahan Desa Dalam Administrasi Pelayanan Publik Studi Kasus Di Desa Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. In Seminar Teknologi Majalengka (STIMA) (Vol. 5, pp. 76-84).
- Syaputra, A. (2021). Aplikasi E-Kelurahan Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Dalam Mendukung Penerapan E-Government. Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer, 20(2), 379-388.